



Pengembangan Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Literatur

Sri Rahayu¹, Juliani², Rosa Miana³, Andi Syaputra⁴

^{1,2,3,4} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: sriahayu160602@gmail.com.

ABSTRAK

Pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia merupakan aspek strategis dalam menjawab dinamika sosial, tuntutan globalisasi, serta kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur yang membahas kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, baik dari perspektif regulasi, manajemen kelembagaan, maupun implementasinya di lapangan. Metode yang kami gunakan yaitu kajian literatur terhadap sebuah naskah, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berkas kebijakan terkait pendidikan Islam. Berdasarkan analisis data, dapat diketahui kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat, terutama dalam penguatan legalitas, integrasi kurikulum, dan peningkatan tata kelola lembaga. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah tantangan, seperti ketimpangan kualitas antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta inkonsistensi implementasi kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kelembagaan agar pendidikan Islam mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan pendidikan nasional. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi akademik rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan arah pengembangan kelembagaan pendidikan keislaman di negara Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Literatur, Kebijakan Pendidikan Islam, Kelembagaan Pendidikan Islam, Pendidikan Islam di Indonesia.

ABSTRACT

The development of institutional policies for Islamic education in Indonesia constitutes a strategic aspect in responding to social dynamics, the demands of globalization, and the need to improve educational quality. This article aims to analyze various pieces of literature that discuss institutional policies of Islamic education in Indonesia, viewed from the perspectives of regulation, institutional management, and practical implementation. The method employed in this study is a literature review of academic manuscripts, scholarly publications, laws, and regulations, as well as policy documents related to Islamic education. Based on the data analysis, it is evident that institutional policies of Islamic education in Indonesia have shown significant progress, particularly in strengthening legal frameworks, curriculum integration, and institutional governance. Nevertheless, several challenges remain, including disparities in quality among institutions, limitations in human resources, and inconsistencies in policy implementation at the regional level. Therefore, more adaptive, collaborative, and institutionally oriented policies are required to ensure that Islamic education can contribute optimally to the development of the national education system. This study can serve as an academic reference for policymakers in formulating future directions for the development of Islamic educational institutions in Indonesia.

Keywords: Literature Analysis, Islamic Education Policy, Islamic Education Institutions, Islamic Education in Indonesia.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem pendidikan memiliki keragaman yang mencerminkan kekayaan budaya dan keagamaan masyarakatnya. Salah satu bentuk lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi signifikan dalam proses pendidikan di Indonesia adalah madrasah. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tidak hanya berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga turut membentuk identitas intelektual dan sosial umat Islam di Indonesia. Menurut Huda dan Zain (2020), madrasah memiliki kontribusi nyata dalam mencetak generasi yang memiliki integritas moral dan pengetahuan akademik yang seimbang. Selain itu, hasil penelitian Siregar dan Nasution (2021) menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan madrasah melalui penguatan kurikulum dan manajemen pendidikan telah memperkuat daya saing lembaga ini di tengah sistem pendidikan nasional yang terus berkembang. (Inovasi, Pendidik, and Vol 2025)

Pendidikan Islam di Indonesia sejak lama diposisikan sebagai institusi yang menaruh perhatian besar pada pembinaan karakter dan penguatan spiritual peserta didik. Lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, serta sekolah berbasis Islam telah memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kepribadian dan moral generasi bangsa. Akan tetapi, memasuki era modern, arus globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika perubahan sosial menghadirkan tantangan baru yang mengharuskan adanya penyesuaian dan pembaruan kebijakan dalam Pendidikan Islam. Upaya transformasi ini diperlukan agar nilai-nilai karakter yang diajarkan tetap kontekstual dan mampu menjawab tuntutan zaman.

Musa dalam kajiannya menegaskan bahwa Pendidikan Islam tidak hanya berhenti pada pemahaman konseptual mengenai nilai-nilai karakter Islami, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara nyata dalam kehidupan yang bersifat global. Sejalan dengan pandangan tersebut, Najah mengemukakan bahwa globalisasi telah memunculkan wajah baru dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, dan kebudayaan. Ia menilai bahwa proses globalisasi tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yang bersifat ganda, yakni membawa dampak positif sekaligus potensi negatif bagi masyarakat. (Mudzakkir, Naro, and Yahdi 2024)

Sepanjang perjalanan sejarah, Pendidikan Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun peradaban serta membentuk karakter umat Muslim. Sejak masa Rasulullah SAW, aktivitas pendidikan dijadikan sarana strategis dalam penyebaran ajaran Islam sekaligus pembinaan masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak mulia. Orientasi Pendidikan Islam tidak terbatas pada transfer pengetahuan keagamaan semata, melainkan juga menekankan pembinaan moral, etika, dan kepribadian yang luhur.

Melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, nilai-nilai keislaman ditanamkan sejak usia dini sehingga menjadi landasan fundamental dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Atas dasar tersebut, Pendidikan Islam senantiasa dipandang sebagai unsur vital dalam menjaga kesinambungan dan kelestarian ajaran agama. Dalam catatan sejarah, sistem Pendidikan Islam mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari pola pembelajaran yang sederhana pada masa awal Islam hingga

berkembang menjadi sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan kompleks pada era modern. Transformasi ini tidak terlepas dari dinamika zaman yang terus bergerak maju serta tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. (Mudzakkir, Naro, and Yahdi 2024)

Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam saat ini sangat beragam, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya dana, hingga kualitas pengajaran yang belum optimal. Di sisi lain, terdapat peluang besar bagi pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021), implementasi teknologi dalam pendidikan telah meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 30%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi untuk berkembang lebih baik jika mampu memanfaatkan peluang yang ada. (Badruzaman, Maulana, and Fauzi 2025)

Menurut penulis pendidikan Islam adalah suatu proses untuk menumbuhkan keimanan dan ketagwaan kepada Allah secara utuh baik akal, hati, dan perilakunya sehingga melahirkan iman, amal shaleh, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah di bumi. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dan mengkaji pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia secara komprehensif, menganalisis kebijakan yang ada, mengidentifikasi permasalahan kelembagaan, memberikan landasan akademik bagi kebijakan, mendorong peningkatan mutu dan daya saing lembaga pendidikan Islam serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (Assingkily, 2021) sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji fenomena secara komprehensif dengan menitikberatkan pada makna, konsep, dan pemikiran yang berkembang dalam konteks pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai perspektif keilmuan yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam.

Metode studi pustaka dimanfaatkan untuk menelusuri, menghimpun, serta mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kebijakan, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan pengembangan kelembagaan pendidikan Islam. Melalui kajian pustaka, peneliti menganalisis latar belakang sosial, budaya, dan historis yang memengaruhi perkembangan kebijakan pendidikan Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data penelitian diperoleh melalui penelaahan literatur yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi, dokumen kebijakan pemerintah, serta berbagai sumber elektronik yang membahas isu pendidikan Islam. Tahapan pengumpulan data diawali dengan penentuan dan pemetaan sumber pustaka

yang memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi informasi yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menyusun pemahaman secara sistematis terhadap fenomena kelembagaan pendidikan Islam, baik dalam perspektif historis maupun dalam konteks perkembangan kontemporer (Inovasi, Pendidik, and Vol 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan

Istilah *pendidikan* berasal dari kata dasar *didik* yang memperoleh prefiks *pe-* dan sufiks *-an*, sehingga membentuk makna sebagai suatu perbuatan atau proses yang mencakup cara, usaha, dan tindakan tertentu. Secara konseptual, pendidikan dipahami sebagai aktivitas memelihara sekaligus melatih, yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya pengajaran, arahan, serta kepemimpinan, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan akhlak dan pengembangan kecerdasan intelektual. Secara etimologis, istilah pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa Yunani *paedagogie* yang bermakna bimbingan terhadap anak didik. Istilah tersebut kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *education*, yang mengandung arti proses pengembangan dan pembimbingan. Dalam khazanah bahasa Arab, pendidikan dikenal dengan istilah *tarbiyah*, yang juga berarti proses mendidik dan membina.

Dengan demikian, pendidikan dapat dimaknai sebagai bentuk bimbingan atau bantuan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik guna mengembangkan aspek jasmani dan rohani menuju kedewasaan, hingga terbentuknya kepribadian yang utuh, khususnya kepribadian muslim. Dalam pengertian yang lebih terbatas, pendidikan dipahami sebagai proses bimbingan yang diberikan kepada anak didik sampai ia mencapai usia dewasa.

Adapun dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan merupakan proses bimbingan yang berlangsung sepanjang hayat hingga individu mencapai tujuan hidupnya. Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan tersebut diarahkan pada terbentuknya kepribadian muslim yang paripurna. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak dibatasi oleh usia atau jenjang tertentu, melainkan berlangsung sejak seorang anak dilahirkan hingga akhir kehidupannya. Pada hakikatnya, pengertian pendidikan dalam arti sempit dan arti luas saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Selanjutnya, Marimba mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai penanda akhir dari suatu usaha pendidikan, sebagai pengarah jalannya usaha tersebut, sebagai titik awal dalam mencapai tujuan-tujuan lanjutan, serta sebagai pemberi nilai dan karakter terhadap seluruh aktivitas pendidikan yang dilaksanakan. (Badruzaman, Maulana, and Fauzi 2025)

Menurut penulis pendidikan Islam adalah suatu proses untuk menumbuhkan keimanan dan ketagwaan kepada Allah secara utuh baik akal, hati, dan perilakunya sehingga melahirkan iman, amal shaleh, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah di bumi.

Memahami Terma Kebijakan

Istilah *kebijakan* merupakan kata benda abstrak yang berasal dari kata dasar *bijak* dengan penambahan prefiks *ke-* dan sufiks *-an*. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kata *bijak* dimaknai sebagai sikap yang mencerminkan penggunaan akal budi secara matang, kecakapan berpikir, kepandaian, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, *kebijakan* diartikan sebagai rumusan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud tertentu yang dijadikan sebagai pedoman atau garis haluan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam terminologi bahasa Inggris, kebijakan dikenal dengan istilah *policy*, yang bermakna rencana tindakan (*plan of action*) atau pernyataan tujuan (*statement of aims*) yang diarahkan pada pencapaian maksud tertentu (Noer, Nahdlatul, & Sidoarjo, 2023).

Anderson, sebagaimana dikutip oleh Ali Imron, menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang disusun secara terarah dan memiliki tujuan tertentu, yang harus diikuti oleh para pelaksana sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Budiardjo dalam sumber yang sama mengemukakan bahwa kebijakan adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok politik dalam rangka menentukan tujuan-tujuan tertentu beserta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya (Noer, Nahdlatul, & Sidoarjo, 2023).

Lebih lanjut, kebijakan juga dapat dipahami sebagai rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar serta kerangka umum dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, maupun kepemimpinan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman manajerial yang memuat cita-cita, tujuan, serta arah tindakan dalam rangka mencapai sasaran yang telah dirumuskan (Noer, Nahdlatul, & Sidoarjo, 2023).

Apabila istilah kebijakan dikaitkan dengan bidang pendidikan, maka lahirlah konsep kebijakan pendidikan (*educational policy*). Ali Imron, dengan mengutip pendapat Carter V. Good, menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bentuk pertimbangan yang disusun berdasarkan sistem nilai tertentu serta penilaian terhadap berbagai faktor situasional. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat kelembagaan dan berfungsi sebagai perencanaan umum yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. (Noer, Nahdlatul, and Sidoarjo 2023).

Analisis Kondisi Pendidikan Islam

Analisis kondisi pendidikan Islam merupakan langkah kritis dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam di suatu wilayah atau Negara (Mansyur, 2012). Proses analisis ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek kunci seperti kurikulum, metode pengajaran, kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap kondisi pendidikan Islam memungkinkan identifikasi permasalahan spesifik, seperti kesenjangan akses pendidikan, ketidakrelevanan kurikulum, atau kekurangan fasilitas pendukung pembelajaran. Selain itu, analisis ini dapat mengungkap potensi-potensi yang dapat ditingkatkan, seperti keterlibatan aktif masyarakat atau adopsi teknologi dalam proses pembelajaran. Analisis kondisi pendidikan Islam merupakan dasar untuk merumuskan strategi perbaikan dan pengembangan, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan zaman. (Iqbal and Sesmiarni 2025)

Para ahli dalam bidang pendidikan dan manajemen strategic memiliki pandangan yang beragam terkait implementasi manajemen strategic dalam meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia. Prof. Azyumardi Azra, dengan latar belakang sejarah dan pemikiran Islam, mungkin menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai sejarah dan kultural dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan zaman. Dr. Anies Baswedan, sebagai akademisi dan politisi, mungkin membahas peran pemerintah dan kebijakan pendidikan dalam mencapai perubahan yang signifikan. Prof. Nurcholish Madjid mungkin memberikan wawasan tentang cara mengharmoniskan nilai-nilai Islam dengan pendidikan modern. Sementara itu, ahli manajemen seperti Prof. John P. Kotter dapat memberikan pandangan tentang bagaimana memimpin perubahan organisasi, sementara Dr. Muhammad Yunus mungkin menyoroti inovasi sosial dan kemitraan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (H. Usman, 2013). Integrasi perspektif-perspektif ini menjadi krusial untuk mengembangkan strategi yang holistik dan sesuai dengan konteks lokal guna memperbaiki sistem pendidikan Islam di Indonesia. (Iqbal and Sesmiarni 2025)

Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Reformasi hingga Sekarang

Sejak era Reformasi hingga masa kontemporer, lembaga pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan berkelanjutan. Dinamika sosial, politik, serta kebutuhan masyarakat mendorong lembaga pendidikan Islam untuk terus beradaptasi dan memperluas perannya dalam sistem pendidikan nasional. Berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam hadir dan berkembang pada periode ini.

Pada jenjang pendidikan dasar, terdapat Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang menyelenggarakan pendidikan keislaman dan pendidikan umum secara terpadu. Kedua lembaga ini berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Meskipun telah ada sejak masa Orde Baru, SDIT dan MI tetap diminati hingga saat ini karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kurikulum pendidikan umum.

Pada tingkat pendidikan menengah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) berperan sebagai lembaga yang menggabungkan pembelajaran agama Islam dengan mata pelajaran umum. Keduanya juga berada dalam naungan Kementerian Agama dan terus menunjukkan perkembangan, baik dari segi jumlah lembaga maupun kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, pondok pesantren tetap menjadi salah satu pilar utama pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren memberikan pembelajaran mendalam dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Keberadaan pesantren telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dan hingga kini tetap bertahan serta berkembang dengan berbagai pembaruan sesuai kebutuhan zaman.

Pada jenjang pendidikan tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) berperan sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan Islam sekaligus pendidikan umum secara terpadu. Kehadiran UIN mencerminkan upaya integrasi keilmuan antara ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan modern. Perguruan tinggi ini mulai berkembang pesat sejak masa Orde Baru seiring dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional. Hingga saat ini, UIN menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di

Indonesia. Perannya dinilai strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berwawasan keislaman dan keilmuan.

Di samping lembaga-lembaga tersebut, pada masa kini juga bermunculan institusi pendidikan Islam modern yang mengusung pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Beberapa di antaranya adalah Sekolah Islam Terpadu (SIT), Pesantren Modern Gontor, dan lembaga sejenis lainnya. Keberagaman bentuk dan model pendidikan ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan tuntutan zaman, guna memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. (Sari, Sirozi, and Sari 2023)

Jalur Pendidikan

a) Jalur Pendidikan Informal

Menurut Bintank dan Maunah (2022), pendidikan informal merupakan proses pembelajaran yang diperoleh seseorang secara sadar maupun tidak sadar melalui berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, dunia kerja, organisasi, maupun aktivitas sosial lainnya, yang berlangsung sejak seseorang dilahirkan hingga akhir hayat. Tentu saja, proses pendidikan ini berlanjut seumur hidup. Pendidikan informal ini merupakan pendidikan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan karakter bangsa dan merupakan tahap pertama Seseorang sedang melalui proses pendidikan. Pendidikan informal merupakan pendidikan berupa kegiatan belajar mandiri dengan jalur pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan. Dalam pendidikan informal keluarga berfingsi sebagai lembaga pendidikan pertama.

Keluarga adalah pendidikan pertama dan paling utama dalam pendidikan informal. Di dalam keluarga, anak mendapatkan bimbingan pertama sepanjang kehidupannya (Binti, 2009). Ini adalah tempat di mana anak menerima kasih sayang, mengembangkan perasaan, dan mengetahui tujuan hidupnya. Interaksi dalam keluarga membantu menumbuhkan dan mengembangkan potensi alami dalam diri anak. Menurut Sudiapermana (2009), pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga mencakup berbagai aspek, antara lain pembinaan keimanan, akhlak, kesehatan fisik, kecerdasan intelektual, kondisi psikologis, kemampuan sosial, hingga pendidikan seksual. Dalam konteks ini, orang tua memegang peranan dan tanggung jawab utama sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak, khususnya dalam penanaman nilai-nilai keagamaan. Islam memandang keluarga sebagai salah satu lembaga pendidikan yang fundamental, karena proses pembentukan sikap, nilai, dan kepribadian anak bermula dari lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, pendidikan informal yang dilaksanakan dalam keluarga memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk karakter serta mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Al-Qur'an juga memberikan penegasan mengenai besarnya tanggung jawab pendidikan dalam keluarga, sebagaimana diisyaratkan dalam Surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

b) Jalur Pendidikan Formal

Menurut (Maunah, 2015) Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan diatur oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Pendekatan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Pendekatan ini melibatkan lembaga pendidikan resmi yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah. Pendidikan formal memiliki ciri-ciri khusus, seperti proses pembelajaran yang dilakukan secara formal sesuai dengan ketentuan pemerintah atau lembaga tertentu. Peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan formal. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di gedung sekolah atau perguruan tinggi. Sesuai dengan Otoritas pengelolaan pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah.

c) Jalur Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal adalah jenis pendidikan yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal dan memiliki kegiatan yang terorganisir dan sistematis. Tujuan dari pendidikan nonformal adalah mencapai tujuan pendidikan tertentu bagi anak-anak. Contoh kegiatan pendidikan nonformal meliputi pengajian, taklim berjamaah, tambahan Al Quran, dan pendidikan agama. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nonformal, pendidikan nonformal juga mencakup Dewan Pendidikan dan satuan pendidikan sejenis. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Irsalulloh and Maunah 2023)

Pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan pendidikan di luar sistem formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pendidikan nonformal memberikan alternatif bagi individu yang ingin mendapatkan pendidikan dengan cara yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pendidikan nonformal, kegiatan pendidikan seperti pengajian, taklim berjamaah, dan pendidikan agama dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik. Pendidikan nonformal ini dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan keagamaan kepada peserta didik. Secara keseluruhan, pendidikan nonformal adalah jenis pendidikan yang dilakukan di luar sistem formal, terorganisir, dan memiliki tujuan tertentu. (Irsalulloh and Maunah 2023)

Kebijakan Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam dapat dipahami sebagai suatu proses pengelolaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik yang berasal dari umat Islam, lembaga pendidikan, maupun unsur pendukung lainnya. Sumber daya tersebut mencakup aspek fisik (perangkat keras) dan nonfisik (perangkat lunak) yang dimanfaatkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak secara efektif, efisien, dan produktif. Tujuan akhir dari pengelolaan ini tidak hanya berorientasi pada keberhasilan duniawi, tetapi juga pada tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi serta upaya peningkatan mutu

lembaga pendidikan Islam agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional, diperlukan sistem manajemen yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan manajerial yang digunakan adalah penerapan fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling).

- **Perencanaan (Planning)**

Perencanaan merupakan proses penetapan dan penentuan secara matang terhadap berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks organisasi pendidikan, perencanaan pendidikan menurut ST. Vembriarto dapat dimaknai sebagai penerapan analisis yang rasional dan sistematis untuk mengembangkan sistem pendidikan agar berjalan lebih efektif dan efisien dalam merespons kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Perencanaan yang baik disusun dengan mempertimbangkan kondisi masa kini dan proyeksi masa depan, sehingga keputusan yang diambil memiliki relevansi dan keberlanjutan. Dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, proses perencanaan program pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Islami yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga tujuan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernilai spiritual.

- **Pengorganisasian (Organizing)**

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi administratif manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Organisasi dapat dipahami sebagai sistem kerja sama sekelompok individu yang disusun untuk mencapai tujuan bersama. Tahap awal dalam proses pengorganisasian diawali dengan penetapan bidang-bidang kerja atau fungsi-fungsi yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan organisasi. Setiap bidang tersebut menjadi bagian dari suatu sistem yang saling terhubung dan bergerak secara terpadu menuju tujuan yang sama. Dengan demikian, masing-masing unit kerja berperan sebagai subsistem yang menjalankan tugas tertentu sesuai dengan fungsinya. Implementasi fungsi organizing dalam lembaga pendidikan Islam tercermin melalui terbangunnya kesatuan, kekompakan, solidaritas, serta mekanisme kerja yang terstruktur, sehingga aktivitas kelembagaan dapat berjalan secara stabil dan efektif. Prinsip kesatuan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersamaan dan keutuhan dalam setiap bentuk organisasi.

- **Penggerakan (Actuating)**

Fungsi penggerakan (actuating) merupakan bagian inti dari proses manajemen organisasi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Fungsi ini mencakup aktivitas pengarahan, kepemimpinan, pemberian perintah, koordinasi, serta motivasi kepada seluruh anggota organisasi. Dalam proses actuating, pimpinan berperan memberikan dorongan, bimbingan, dan kesadaran kepada seluruh pelaksana agar memahami tujuan pekerjaan yang dilakukan serta memiliki kemauan untuk bekerja secara optimal. Penggerakan dilakukan melalui pemberian instruksi, pedoman, nasihat, serta komunikasi yang efektif. Actuating menjadi pusat penggerak manajemen karena berfungsi menghidupkan seluruh rencana yang telah disusun. Inti dari fungsi ini terletak pada kepemimpinan yang mampu menciptakan komunikasi yang baik, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan arahan dan peringatan apabila diperlukan, demi kelancaran dan keberlangsungan roda organisasi.

- ***Pengendalian (Controlling)***

Pengendalian atau evaluasi dalam manajemen merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam manajemen pendidikan Islam, evaluasi memiliki dua makna utama. Pertama, sebagai proses untuk menilai tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Kedua, sebagai upaya memperoleh umpan balik (feedback) dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Proses evaluasi ini mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian, di mana pengukuran dilakukan melalui berbagai bentuk pengujian sebagai dasar dalam menentukan kualitas dan keberhasilan suatu program. Fungsi controlling memiliki peran strategis karena menjadi tahap akhir dalam rangkaian fungsi manajemen. Melalui pengendalian, pimpinan lembaga dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tercapai, sekaligus melakukan pemantauan terhadap efektivitas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta mengambil langkah perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan. (Nurdiana and Hamami 2025)

Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran

Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran saat ini menjadi salah satu unsur pembeda utama antar lembaga pendidikan. Integrasi teknologi tidak hanya mendukung efektivitas pembelajaran, tetapi juga memperluas cakupan dan kualitas layanan pendidikan. Berikut ini merupakan uraian mengenai urgensi penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

- Pertama, teknologi berperan dalam memperluas akses serta meningkatkan fleksibilitas belajar. Widiara (2018) menjelaskan bahwa kehadiran teknologi memungkinkan peserta didik memperoleh materi pembelajaran secara lebih terbuka dan tidak terikat oleh ruang maupun waktu. Melalui platform pembelajaran daring, siswa dapat belajar dari berbagai lokasi dan menyesuaikan waktu belajar sesuai dengan kebutuhan pribadi. Selain itu, penerapan pembelajaran jarak jauh (online learning) memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengikuti pendidikan tanpa keharusan hadir secara langsung di institusi pendidikan. Kondisi ini sangat membantu lembaga pendidikan dalam menjangkau peserta didik yang berada di daerah terpencil maupun mereka yang memiliki keterbatasan fisik, jarak, atau waktu.
- Kedua, pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan interaksi dan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar. Menurut Christanty dan Cendana (2021), berbagai perangkat dan aplikasi berbasis teknologi, seperti forum diskusi daring, platform kolaboratif, serta media pembelajaran berbasis permainan, dapat mendorong keterlibatan siswa secara lebih optimal. Melalui sarana komunikasi digital, siswa dapat berinteraksi dengan guru maupun sesama peserta didik untuk bertukar gagasan, berdiskusi, dan mengerjakan proyek secara bersama-sama. Selain itu, penggunaan media multimedia seperti video, simulasi, dan bahan ajar interaktif turut menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, sehingga berdampak positif terhadap motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.
- Ketiga, teknologi berkontribusi dalam memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Kosasih (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan media digital, audio-visual, dan multimedia interaktif memungkinkan penyajian materi

pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Sebagai contoh, penggunaan simulasi berbasis komputer pada mata pelajaran sains atau teknologi dapat membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak melalui visualisasi dan interaksi langsung. Selain itu, teknologi juga membuka akses terhadap beragam sumber belajar daring, seperti buku elektronik, jurnal digital, video pembelajaran, serta platform berbasis komputasi awan. Dengan demikian, pengalaman belajar siswa menjadi lebih mendalam dan tidak terbatas pada sumber belajar konvensional.

- Keempat, teknologi mendukung pelaksanaan penilaian serta pemberian umpan balik yang lebih efektif. Sari (2018) mengemukakan bahwa melalui sistem pembelajaran digital, guru dapat menyelenggarakan tugas, latihan, maupun ujian secara daring yang memungkinkan proses penilaian dilakukan secara lebih cepat dan efisien, bahkan secara otomatis. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidik untuk menyampaikan umpan balik secara tepat waktu sehingga siswa dapat segera memperbaiki pemahaman dan kinerjanya. Di samping itu, teknologi memungkinkan pemantauan perkembangan belajar siswa secara individual, sehingga guru dapat memberikan pendampingan dan bimbingan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. (Sholeh 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur mengenai pengembangan kebijakan kelembagaan Pendidikan Keslam di negara ini, kesimpulannya kebijakan kelembagaan pendidikan keIslaman mempunyai fungsi yang strategis dalam menopang keberlangsungan, kualitas, dan relevansi pendidikan Islam di tengah dinamika perubahan sosial, budaya, dan global. Pendidikan Islam tidak lagi diposisikan sebagai sistem pendidikan alternatif semata, melainkan sudah berperan sebagai bagian esensial dari suatu pendidikan nasional yang diakui secara yuridis dan struktural. Hal ini tercermin dari berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah yang memberikan ruang, legitimasi, serta arah pengembangan bagi lembaga pendidikan Islam, baik formal, nonformal, maupun informal.

Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan kelembagaan kependidikan keIslaman di negara ini telah menunjukkan peningkatan cukup besar, terutama dalam aspek legalitas kelembagaan, standarisasi mutu, serta penguatan tata kelola lembaga. Kebijakan tersebut mendorong lembaga kependidikan keIslaman untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keislaman sebagai landasan utama. Integrasi antara nilai religius dan kompetensi akademik menjadi ciri khas yang terus dikembangkan dalam kebijakan pendidikan Islam, sehingga lulusan diharapkan mampu bersaing secara global sekaligus memiliki karakter dan akhlak yang kuat.

Namun demikian, berbagai literatur juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan kelembagaan pendidikan Islam masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Ketimpangan kualitas antar lembaga, keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang profesional, dan minimnya sarana dan fasilitas dan infrastruktur di sebagian wilayah menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan

pelaksanaannya di tingkat daerah, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor birokrasi, kapasitas manajerial, serta komitmen para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, analisis literatur mengungkapkan bahwa pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kebijakan bukan hanya soal sisi administratif serta struktural, namun pada penguatan budaya mutu, inovasi pembelajaran, serta pemberdayaan seluruh komponen lembaga pendidikan Islam. Sinergi antara pemerintah, pengelola lembaga pendidikan Islam, masyarakat, dan dunia industri menjadi kunci penting dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan kebijakan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi, efektivitas implementasi, serta komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam secara menyeluruh. Kajian literatur ini menegaskan perlunya kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil lembaga pendidikan Islam agar mampu berkontribusi secara optimal untuk mencetak SDM Indonesia yang beriman, cerdas dan berbudi pekerti luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Badruzaman, Tjetjep Ismail, Muhammad Rizal Maulana, and Wildi Ahmad Fauzi. 2025. "Jurnal Pendidikan Indonesia : Menakar Ulang Kebijakan Pendidikan Islam : Studi Literatur Atas Ketidaksesuaian Regulasi Dan Praktik Lapangan." 5(4).
- Inovasi, Jurnal, Tenaga Pendidik, and Kependidikan Vol. 2025. "1,2,3,4." 5(2): 74–83.
- Iqbal, Muhamad, and Zulfani Sesmiarni. 2025. "Implementasi Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Di Indonesia." 3(2): 89–101.
- Irsalulloh, Dimas Bagus, and Binti Maunah. 2023. "PENDIKDAS : Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar g" 04(02): 17–26.
- Islam, Pendidikan, and Pendidikan Karakter. 2024. "Swarna Mulia: Journal Islamic Studies Volume 1 No 1 June 2024." 1(1): 28–41.
- Mudzakkir, Ahmad, Wahyuddin Naro, and Muhammad Yahdi. 2024. "Sejarah Pendidikan Islam : Karakter Pendidikan Islam Klasik & Modern Pendahuluan." (3): 176–86.
- Noer, Syaifudin, Universitas Nahdlatul, and Ulama Sidoarjo. 2023. "Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Kualitas Mutu Guru Pendidikan Agama Islam; Analisis Sistematis Literatur Review." 4(2): 165–95.
- Nurdiana, Whan, and Tasman Hamami. 2025. "Strategi Penguatan Kelembagaan Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Daya Saing Di Era Globalisasi." 2(4): 342–54.
- Sari, Ana Kurnia, Muhammad Sirozi, and Ana Kurnia Sari. 2023. "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA MASA REFORMASI (1998-SEKARANG)." 10(1): 20–37.
- Sholeh, Muh Ibnu. 2023. "Menghadapi Persaingan Sengit Lembaga Pendidikan : Strategi Diferensiasi Dalam Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." 1(3): 192–222.